

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada lokasi yang sangat strategis terdiri dari 17.040 pulau yang tersebar dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, hingga saat ini ada banyak kabupaten/kota yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Dalam mengelola kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, pemerintah mengambil alih peranan dalam mengelola kekayaan yang dimiliki oleh NKRI. Otonomi daerah diharapkan mampu memberikan pengelolaan yang lebih efektif. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, kewenangan serta tanggungjawab yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Dampak dari diterapkannya otonomi daerah tersebut membuat pola pengelolaan keuangan daerah mengalami suatu perubahan yang sangat mendasar. Dengan adanya Otonomi daerah ini dapat dijadikan sebagai Perwujudan dari Perpindahan suatu sistem pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi ialah sistem pelimpahan kekuasaan yang lebih dominan diberikan kepada pemerintah daerah, tapi desentralisasi bukan hanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga peralihan wewenang dari pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi yang artinya proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi (Mardiasmo, 2013).

Tujuan diselenggarakannya desentralisasi diharapkan agar bisa mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan dan peran dari masyarakat itu sendiri serta dapat terus tumbuh dan mampu bersaing dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Landasan utama dalam melaksanakan sistem desentralisasi agar suatu tujuan dari penerapan otonomi daerah dapat tercapai sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 sebagai Dasar Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut ditekankan harus ada pengalihan hak, wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan seluruh kegiatan di pemerintahan daerah masing-masing, baik dalam urusan pemerintah maupun kepentingan masyarakat setempat serta terhadap pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Dengan anggapan saat itu pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sudah paham akan kebutuhan, potensi serta keinginan masyarakat di daerah masing-masing (Sumarsono,2010).

Dengan diterapkannya otonomi daerah ada konsekuensi atas penerapan otonomi daerah tersebut yaitu harus diikuti dengan peningkatan kinerja yang signifikan agar dapat mencapai tujuan dari otonomi itu sendiri, akan tetapi faktanya rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah berada pada angka 0-25% dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah terlihat masih belum mandiri dan masih sangat tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerahnya terhadap bantuan dari pemerintah pusat (Budianto dan Alexander,2016).

Berdasarkan hasil pemeriksaan audit dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 (2017), secara terperinci BPK-RI mengungkap bahwa diindonesia masih terdapat 9.729 temuan yang terdiri dari 14.997 permasalahan. Dari 14.997 permasalahan terdapat 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp2.25 triliun dari 164 permasalahan terdapat 12(7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11.98 miliar dan 30(18%), permasalahan ketidakhematan senilai Rp574,31 miliar dan 122(75%), permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1.67 triliun. Jika dalam suatu daerah terdapat banyak permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan kinerja keuangan yang ada pada daerah tersebut dianggap belum baik, maka dari itu kita dapat melihat kinerja pemerintah sudah baik atau belum lewat pendapatan asli daerah di daerah tersebut karena semakin besar realisasi pad makan akan semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut. Berdasarkan masalah-masalah yang masih ditemui terlihat jelas bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum bisa dikatakan baik.

Tabel 1.1
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2015-2018
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Bengkulu Selatan	51.660	58.748	58.483	67.243
Kabupaten Bengkulu Tengah	19.060	27.205	23.684	23.500
Kabupaten Bengkulu Utara	52.346	67.645	70.272	117.688
Kabupaten Kaur	24.214	34.557	38.132	37.085
Kabupaten Kapahiang	28.018	31.455	30.212	34.444
Kabupaten Lebong	17.201	17.147	19.882	35.309
Kabupaten Mukomuko	42.740	62.046	80.932	85.747
Kabupaten Rejang Lebong	58.706	71.294	113.019	84.508
Kabupaten Seluma	27.459	28.643	54.153	58.028
Kota Bengkulu	96.768	110.831	170.921	182.884

(Sumber : data diolah dari *LHP BPK RI PERWAKILAN BENGKULU, 2021*)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pemerintah kabupaten/kota setiap tahunnya mengalami perubahan peningkatan pendapatan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan beban tanggungjawabnya dengan baik. Pendapatan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Pendapatan Asli daerah ialah Penghasilan daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi yang ada di daerah itu sendiri. Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pad yang sah. Apabila suatu Pendapatan Asli daerah (PAD) semakin besar maka terjadi penurunan pada rasio efisiensi yang merupakan representasi baiknya kinerja keuangan pemerintah, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat terjadi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah banyaknya aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat memberikan peluang terjadinya kebocoran anggaran sehingga dapat mengakibatkan adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah Selain Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana perimbangan juga adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap APBD. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan transfer lainnya. Dana perimbangan yang tinggi justru memiliki kinerja yang rendah dan penggunaan Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat belum digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah sehingga penggunaan dana belum mencapai target untuk kepentingan publik, pemerintah daerah juga dituntut untuk mandiri dan tidak ketergantungan dengan pemerintah pusat, mencapai kemandirian daerah dan pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif.

Dari data Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2018 yang dilihat dari <http://www.bpk.go.id> terlihat bahwa Rendahnya Perbandingan antara nilai PAD terhadap Dana Perimbangan di provinsi Bengkulu tersebut. Dengan lebih besarnya nilai dari Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus dibandingkan dengan Pendapatan asli

daerah itu menjelaskan bahwa permasalahan yang masih ada di provinsi Bengkulu adalah pemerintah daerah masih ketergantungan dengan bantuan dari pemerintah pusat, itu dapat terlihat dari besarnya bantuan pemerintah pusat yang diterima oleh provinsi Bengkulu. Pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah sehingga pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Diterimanya Dana Perimbangan oleh masing-masing daerah di atas 50 persen mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di masing-masing provinsi terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Seharusnya dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari diterimanya dana tersebut, dan juga diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Rasio Kemandirian digambarkan melalui tingkat ketergantungan suatu daerah masing-masing terhadap sumber dana ekstern rasio kemandirian ditunjukkan berdasarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai segala kegiatan yang ada dalam lingkup pemerintahnya baik dalam pembangunan serta pelayanan sebagai wujud dari pertanggungjawaban kepada masyarakat yang sudah berkontribusi dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah baik dalam hal membayar pajak maupun retribusi lainnya. Semakin besar rasio kemandirian maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut semakin meningkat karena semakin besar PAD maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut sudah mampu menggali potensi daerah tersebut. Rasio kemandirian dapat dilihat dengan membandingkan antara besar pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yaitu DAU, DBH, DAK dan Pinjaman.

Berdasarkan fenomena masalah masih besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, serta masih rendahnya perbandingan PAD dan Dana perimbangan yang diterima oleh provinsi Bengkulu yang seharusnya PAD harus lebih besar dari pada dana perimbangan agar

pemerintah daerah tersebut tidak ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan bisa memperbaiki kinerja keuangan dipemerintah daerah tersebut. Hal ini memberikan dorongan peneliti untuk mengangkat judul **”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah ,Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan memberikan kemudahan dalam menganalisis serta mengolah data maka penelitian ini dilakukan di pemerintah kabupaten dan kota diwilayah Bengkulu. Sample yang diambil terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bengkulu serta peneliti memilih objek untuk dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan kota tahun 2015-2018 yang tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Penelitian ini fokus menguji pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kinerja keuangan. Untuk Pengolahan data dalam penelitian ini

menggunakan alat bantu software *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) 24.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu T.A 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu T.A 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu T.A 2015-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu T.A 2015-2018.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empiris serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang memebrikan kontribusi untuk menambah wawasan terkait kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Povinsi Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini mampu menambah khasanah pengetahuan, khususnya pada bidang keuangan sektor publik.

b) Bagi Lembaga

Bagi lembaga terkait penelitian ini mampu memberi sumbangsi yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/i POLSRI dan Perguruan tinggi lainnya

c) Bagi Instansi Terkait

Bagi instansi yang memiliki keterkaitan penelitian ini mampu memberi rekomendasi dan dapat ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan strategis terkait upaya-upaya perbaikan terhadap kinerja keuangan di pemerintah kabupaten/kota masing-masing sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat tercipta kinerja keuangan yang jauh lebih baik dari pada sebelumnya.

